



INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN HASIL EVALUASI LKjIP TAHUN 2020

NOMOR : 700/059/TIM-V/ITKOT
TANGGAL : 07 JUNI 2021
TIM PEMERIKSA : TIM V
OBJEK PEMERIKSAAN : DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN



INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN HASIL EVALUASI LKjIP TAHUN 2020

NOMOR : 700/059/TIM-V/ITKOT
TANGGAL : 07 JUNI 2021
TIM PEMERIKSA : TIM V
OBJEK PEMERIKSAAN : DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN INSPEKTORAT

Jl. RUHUI RAHAYU I Telp./Fax. (0542) 7218734 KOTAK POS 1111
BALIKPAPAN 76115

Email : inskot.balikpapan@yahoo.co.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Balikpapan Nomor: 090.1/047/REG/ITKOT, tanggal 01 April 2021, Tim Evaluasi telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **Dinas Perhubungan Kota Balikpapan**, Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/1301/M.PAN/04/2009, perihal Kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan direvisi dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dengan nilai sebesar **76,97 kategori BB: Sangat baik (dilihat dari LKE-Lembar Kriteria Evaluasi)**. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan untuk Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari:

INSPEKTORAT

J. RUMAH BAHAGI TELUKAN (0542) 718734 KOTAK-POS 1111
BALIKPAPAN 76114

No	Komponen yang dinilai	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Bobot	Hasil Evaluasi	Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	23,87	30	27,12
2	Pengukuran Kinerja	25	19,69	25	20,31
3	Pelaporan Kinerja	15	10,69	15	10,69
4	Evaluasi Internal	10	6,93	10	7,43
5	Capaian Kinerja	20	12,50	20	11,42
	Nilai Hasil Evaluasi		73,68		76,97
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB		BB

Poin 1 s/d 5 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan pada LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi.

5. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



BAB I

PENDAHULUAN

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan tujuan tersebut diarahkan untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi, penguatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna mengetahui sejauh mana perangkat daerah pada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong adanya peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu dilakukan evaluasi implementasi SAKIP sebagai upaya konsistensi dalam meningkatkan implementasi SAKIP dan untuk mewujudkan capaian kinerja instansi sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

Telah dilakukan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan guna menilai sejauh mana capaian kinerja yang telah dilakukan di tahun 2020.

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Surat Tugas Inspektur Kota Balikpapan Nomor: 090.1/047/REG/ITKOT, tanggal 01 April 2021.

2. Latar Belakang

Konsistensi terhadap evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan terus dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah melalui monitoring terhadap sistem yang ada pada perangkat daerah dengan melakukan evaluasi terhadap LKjIP, Renstra, IKU, IKI, Perjanjian Kinerja, Pemantauan Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja pada Perangkat Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi adalah untuk memberikan penilaian dan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas aparatur Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan evaluasi terhadap perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran capaian kinerja serta pelaporan kinerja yang digunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja adalah metodologi yang pragmatis, karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah yang pragmatis ini dipilih dengan pertimbangan agar lebih cepat menghasilkan rekomendasi atas hasil evaluasi untuk perbaikan penerapan Sistem AKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi. Terhadap setiap aspek yang dinilai, dilakukan pengumpulan data dengan cara: wawancara, observasi, perbandingan dengan data sekunder, dan konfirmasi-konfirmasi seperlunya. Kemudian setiap sub komponen yang dievaluasi ini ditetapkan kriteria penilaiannya dengan menggunakan standar dan kebenaran normatif yang ada pada peraturan perundangan, pedoman, serta petunjuk yang berlaku, maupun mengacu pada praktik-praktik terbaik (*best practices*) manajemen kinerja dan akuntabilitas kinerja.

6. Gambaran Umum Evaluatan

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Balikpapan dengan dasar pembentukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Perwali Nomor 49 Kota Balikpapan Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan. Tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Balikpapan mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan, melaksanakan tugas teknis di Bidang Perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi teknis lalulintas dan parkir, teknis angkutan dan terminal, teknis sarana dan teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan urusan perhubungan;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan perhubungan;

3. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan serta pemantauan dan analisa kelayakan sarana prasarana urusan perhubungan;
4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan perhubungan;
5. Pelaksanaan penyusunan regulasi, tatakelola, pengendalian, pengawasan, pemberian layanan perizinan dan atau rekomendasi perizinan urusan perhubungan;
6. Pemberian saran teknis, rekomendasi teknis untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan bidang perhubungan yang pelayanannya telah dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
7. Pengelolaan manajemen bidang perhubungan;
8. Pembinaan teknis bidang perhubungan;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan (berdasar Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2016) terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
 - Membawahi:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan
 - b. Subbagian umum
3. Bidang Lalu Lintas Jalan
 - Membawahi :
 - a. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Jaringan Transportasi
 - b. Seksi Pemeliharaan Prasarana Sarana lalu Lintas dan PJU
 - c. Seksi Data Informasi dan Sistem Kontrol Kawasan Lalu Lintas
4. Bidang Angkutan
 - Membawahi ;
 - a. Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus

- b. Seksi Angkutan Orang
 - c. Seksi Pengendalian Operasional
5. Bidang Perairan dan Udara
- Membawahi :
- a. Seksi Angkutan Laut Sungai Danau dan Penyeberangan
 - b. Seksi Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan
6. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
7. UPT Pengelola Parkir
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2020 berjumlah 219 (dua ratus sembilan belas) orang, terdiri dari PNS 120 (seratus dua puluh orang) orang dan Non PNS 99 (sembilan puluh sembilan) orang.

Isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan berdasarkan tugas dan fungsinya antara lain adalah Meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum, kapasitas jalan yang terbatas banyak ditemukan ruas-ruas jalan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, laju pertumbuhan kendaraan tidak diimbangi dengan pembangunan jaringan jalan, angkutan barang yang melebihi tonase masih melintas di dalam kota, prasarana transportasi yang kurang optimal dan kurangnya pelayanan angkutan umum berbasis antarmoda.

Pada Renstra 2016-2021 Visi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan adalah "Mewujudkan sistem transportasi yang tertib dan ramah lingkungan.", dengan Misi yang diemban sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Transportasi;
2. Meningkatkan Transportasi yang berkeselamatan, aman, nyaman dan terintegrasi;
3. Mengembangkan Manajemen dan Rekayasa Transportasi;
4. Meningkatkan pelayanan perhubungan yang mudah, informatif dan transparan

7. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2019 memperoleh nilai **73,68 kategori BB: Sangat Baik**, namun perlu sedikit perbaikan.

Atas pelaksanaan evaluasi tersebut, diperoleh langkah-langkah perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sebagai berikut:

No	Rekomendasi Inspektorat	Langkah Perbaikan	Keterangan
A. Perencanaan Kinerja			
1	Manajemen Dinas Perhubungan Kota Balikpapan agar mendokumentasikan bukti-bukti dilakukannya pelaksanaan rencana aksi dan bukti-bukti dimanfaatkannya rencana aksi dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.	Telah ditindaklanjuti	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal terhadap target dan realisasi kinerja rencana aksi yang direncanakan pada dokumen pelaksanaan.
B. Pengukuran Kinerja			
1	Manajemen Dinas Perhubungan Kota Balikpapan agar melakukan pengumpulan data kinerja secara bulanan / triwulan / semesteran atas progress pelaksanaan Rencana Aksi dan hasil evaluasi program agar ditindaklanjuti sebagai bentuk perbaikan pelaksanaan program atas rencana aksi.	Telah ditindaklanjuti	Pengumpulan dan penyusunan data kinerja yang memadai antara target dan realisasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung rencana aksi secara berkala.
2	Manajemen Dinas Perhubungan Kota Balikpapan agar mendokumentasikan bukti - bukti pemantauan / pengukuran pencapaian target kinerja secara berkala.	Telah ditindaklanjuti	Pemantauan dan evaluasi serta pengukuran capaian target atas rencana aksi dilaksanakan secara rutin/berkala sesuai perencanaan.

No	Rekomendasi Inspektorat	Langkah Perbaikan	Keterangan
3	Manajemen Dinas Perhubungan Kota Balikpapan agar mendokumentasikan bukti dilaksanakannya evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi dan pendokumentasian hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan	Telah ditindaklanjuti	Mekanisme pengumpulan data kinerja dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi berpedoman pada Standar Operasi Pelayanan (SOP) yang telah disusun dan dikomunikasikan secara fisik maupun sistem yang teredia.
4	Manajemen Dinas Perhubungan Kota Balikpapan agar melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengukuran capaian kinerja dari eselon IV keatas dan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.	Telah ditindaklanjuti	Capaian kinerja dijadikan sebagai dasar pemebrian reward dan punishment bagi PNS di lingkungan Dinas Perhubungan yaitu reward dalam bentuk pengembangan karir pegawai, peningkatan kompetensi / diklat maupun dalam bentuk promosi jabatan, dan punishment berupa teguran lisan maupun tertulis dari atasan.
5	Manajemen Dinas Perhubungan Kota Balikpapan agar Melengkapi Laporan Kinerja dengan menyajikan informasi hasil analisis survey terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan transportasi.	Belum ditindaklanjuti	-

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Nomor: 700/1296/Tim-V/Itkot, tanggal 6 Agustus 2020.

BAB II

HASIL EVALUASI

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Dokumen yang dievaluasi yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu serta Rencana Aksi.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dengan nilai sebesar **76,97 kategori BB: Sangat Baik (dilihat dari LKE-Lembar Kriteria Evaluasi)**. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan untuk Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari:

No	Komponen yang dinilai	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Bobot	Hasil Evaluasi	Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	23,87	30	27,12
2	Pengukuran Kinerja	25	19,69	25	20,31
3	Pelaporan Kinerja	15	10,69	15	10,69
4	Evaluasi Internal	10	6,93	10	7,43
5	Capaian Kinerja	20	12,50	20	11,42
Nilai Hasil Evaluasi			73,68		76,97
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB		BB

Poin 1 s/d 5 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan pada LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan penyempurnaan, yaitu:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja:

Dari penilaian atas komponen perencanaan kinerja diperoleh nilai 27,12 dari nilai maksimal sebesar 30,00 dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Strategis	8,32	10,00	- Renstra telah direviu secara berkala dan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini
2	Perencanaan Kinerja Tahunan	18,80	20,00	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian kinerja eselon III dan eselon IV yang ditandatangani telah diukur dan hasil pengukuran telah diketahui oleh atasan (pemberi amanah), namun belum seluruhnya dilengkapi dengan simpulan keberhasilan dan kegagalan dari target kinerja yang diperjanjikan; - Rencana aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala, namun belum dilengkapi dengan simpulan keberhasilan dan kegagalan, hanya terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja serta implementasi pemberian <i>reward and punishment</i> belum menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja tersebut; - Target-target dalam rencana aksi telah dijadikan acuan untuk memulai pelaksanaan setiap kegiatan dan memiliki hubungan yang logis antara setiap <i>output</i> kegiatan dengan sasaran (<i>outcome</i>) yang akan dicapai.

Poin 1 s/d 5 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan pada LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan penyempurnaan, yaitu:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja:

Dari penilaian atas komponen perencanaan kinerja diperoleh nilai 27,12 dari nilai maksimal sebesar 30,00 dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Strategis	8,32	10,00	- Renstra telah direviu secara berkala dan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini
2	Perencanaan Kinerja Tahunan	18,80	20,00	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian kinerja eselon III dan eselon IV yang ditandatangani telah diukur dan hasil pengukuran telah diketahui oleh atasan (pemberi amanah), namun belum seluruhnya dilengkapi dengan simpulan keberhasilan dan kegagalan dari target kinerja yang diperjanjikan; - Rencana aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala, namun belum dilengkapi dengan simpulan keberhasilan dan kegagalan, hanya terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja serta implementasi pemberian <i>reward and punishment</i> belum menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja tersebut; - Target-target dalam rencana aksi telah dijadikan acuan untuk memulai pelaksanaan setiap kegiatan dan memiliki hubungan yang logis antara setiap <i>output</i> kegiatan dengan sasaran (<i>outcome</i>) yang akan dicapai.

b. Pengukuran Kinerja:

Dari penilaian atas komponen pengukuran kinerja diperoleh nilai 20,31 dari nilai maksimal sebesar 25,00 dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Pemenuhan Kinerja	5,00	5,00	- Telah terdapat IKU dan ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya.
2	Kualitas Pengukuran	10,62	12,50	- Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang mulai dari eselon III sampai dengan eselon IV, namun pengukuran tersebut tidak sampai ke individu staf operasional (individu);
3	Implementasi Pengukuran	4,69	7,50	<ul style="list-style-type: none"> - Target kinerja eselon III dan eselon IV telah dimonitor pencapaiannya, namun belum dilengkapi dengan simpulan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan dari target kinerja yang diperjanjikan serta rekomendasi perbaikan untuk tiap target kinerja tersebut; - Hasil pengukuran (capaian) belum dikaitkan dalam pemberian <i>reward and punishment</i> dengan kriteria: a) pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja; b) pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target; c) pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai); d) pejabat/pegawai dengan capaian di atas standar dengan yang standar; - Kinerja atas rencana aksi telah dilakukan pengukuran secara triwulan, namun hasil pengukuran rencana aksi tersebut belum dilengkapi dengan simpulan kemajuan (<i>progress</i>) kinerja dan hambatan atas rencana aksi

c. Pelaporan Kinerja:

Dari penilaian atas komponen pelaporan kinerja diperoleh nilai 10,69 dari nilai maksimal sebesar 15,00 dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Pemenuhan Pelaporan	2,81	3,00	- Laporan kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu.
2	Penyajian Informasi Kinerja	5,18	7,50	- Laporan kinerja telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>outcome</i> namun Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja masih perlu ditingkatkan kendala informasi yang disajikan.
3	Pemanfaatan Informasi Kinerja	2,70	4,50	- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja, namun belum bersifat ekstensif dan menyeluruh karena masih ada capaian kinerja tahun berjalan yang lebih rendah dari capaian kinerja tahun sebelumnya; - Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja telah digunakan untuk penilaian kinerja, namun belum bersifat ekstensif dan menyeluruh karena belum dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan keberhasilan/kegagalan kinerja mulai dari eselon III sampai dengan staf operasional (individu).

d. Evaluasi Internal:

Dari penilaian atas komponen evaluasi internal diperoleh nilai 7,43 dari nilai maksimal sebesar 10,00 dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Pemenuhan Evaluasi	1,87	2,00	- Pemantauan rencana aksi telah dilakukan secara periodik (triwulan), namun belum dilengkapi dengan a) simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda; b) analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana.

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
2	Kualitas Evaluasi	3,68	5,00	- Pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja telah dilaksanakan secara triwulan. Dalam rangka memaksimalkan kinerja organisasi perlu dilengkapi mekanisme standar serta terdokumnetasi dengan baik dalam melakukan evaluasi program.
3	Pemanfaatan Evaluasi	1,88	3,00	- Hasil evaluasi rencana aksi belum dilengkapi dengan eviden/bukti tindak lanjut atas rekomendasi.

e. Capaian Kinerja:

Dari penilaian atas komponen capaian kinerja diperoleh nilai 11,42 dari nilai maksimal sebesar 20,00 dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Output Kegiatan dan Informasi Kinerja	4,50	7,50	- Pencapaian target <i>output</i> pada beberapa kegiatan masih belum sesuai target yang direncanakan. Pencapaian target <i>output</i> masih terdapat kinerja yang tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. Informasi kinerja yang disampaikan cukup dapat diandalkan.
2	Outcome Kegiatan dan Informasi Kinerja	6,92	12,50	- Pencapaian target <i>outcome</i> sebagian besar telah dapat dicapai dan informasi cukup dapat diandalkan namun tidak semua capaian target <i>outcome</i> lebih baik dari tahun sebelumnya.

BAB III

SIMPULAN

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, Tim Evaluasi merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja:

- Pengukuran perjanjian kinerja eselon III dan IV yang telah diketahui oleh atasan (pemberi amanah) agar digunakan sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal dan lain-lain) suatu kondisi atau keadaan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan *reward* dan *punishment*;
- Melengkapi monitoring pencapaian rencana aksi atas target kinerja dengan simpulan atau pengumpulan hasil pengukuran untuk menilai keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja yang nantinya diimplementasikan dalam pemberian *reward and punishment*;
- Target-target dalam rencana aksi telah dijadikan acuan untuk memulai pelaksanaan setiap kegiatan dan memiliki hubungan yang logis antara setiap *output* kegiatan dengan sasaran (*outcome*) yang akan dicapai.

b. Pengukuran Kinerja:

- Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berjenjang mulai dari eselon II sampai ke individu staf operasional;
- Monitoring pencapaian target kinerja eselon III dan eselon IV agar dilengkapi dengan simpulan keberhasilan dan kegagalan dari target kinerja yang diperjanjikan serta rekomendasi perbaikan untuk tiap target kinerja tersebut;
- Hasil pengukuran (capaian) agar dikaitkan dalam pemberian *reward and punishment* dengan kriteria: a) pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja; b) pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target; c) pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu

dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai); d) pejabat/pegawai dengan capaian di atas standar dengan yang standar;

- Hasil pengukuran kinerja atas rencana aksi perlu dilengkapi dengan simpulan kemajuan (*progress*) kinerja dan hambatan atas rencana aksi.

c. Pelaporan Kinerja:

- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja namun perlu dilakukan lebih ekstensif agar seluruh capaian kinerja tahun berikutnya lebih tinggi dari capaian kinerja saat ini;
- Penilaian kinerja agar dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan keberhasilan/kegagalan kinerja mulai dari eselon III sampai dengan staf operasional (individu) serta dijadikan dasar pemberian *reward and punishment* atas kinerja pegawai tersebut.
- Informasi dalam laporan kinerja agar menyajikan informasi data sumber hasil analisis capaian kinerja sehingga informasi kinerja dapat diandalkan.

d. Evaluasi Internal:

- Pemantauan rencana aksi telah dilakukan secara periodik (triwulan) perlu dilengkapi dengan: a) simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda; b) analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda;
- Pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja perlu dilaksanakan secara berkala, dalam rangka memaksimalkan kinerja organisasi perlu dilengkapi mekanisme standar serta terdokumentasi dengan baik dalam melakukan evaluasi program;
- Hasil evaluasi rencana aksi perlu dilengkapi dengan eviden tindak lanjut atas rekomendasi.

e. Capaian Kinerja:

- Disarankan agar terus meningkatkan pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya dengan dukungan informasi mengenai kinerja yang dapat diandalkan.

BAB IV

PENUTUP

Inspektorat Kota Balikpapan menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari seluruh pejabat/pegawai Dinas Perhubungan Kota Balikpapan atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2020. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. **Berikut terlampir beberapa hal yang merupakan penjelasan dari poin A s/d E.**

Inspektur Kota Balikpapan,



Tirta Dewi

UKURAN KINERJA (25%)	25,00	81,23%	20,31	
PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5,00	100,00%	5,00	
Terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU)</i> sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1,00	
Terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai ukuran kinerja atasannya		A	1,00	
Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00	OK
Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12,50	85,00%	10,62	
IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00	OK
IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		A	1,00	OK
IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0,75	OK
Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75	OK
Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0,75	OK
Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0,75	OK
Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,75	OK
Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK
Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00	OK
Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,00	OK
IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)	7,50	62,50%	4,69	
IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75	OK
IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50	OK
Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50	OK
Skala pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>		B	0,75	OK
IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		B	0,75	OK
Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50	OK
LAPORAN KINERJA (15%)	15,00	71,25%	10,69	
PEMENUHAN PELAPORAN (3%)	3,00	93,75%	2,81	
Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00	
Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00	OK
Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00	OK
Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		B	0,75	OK
SENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)	7,50	69,00%	5,18	
Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang mengorientasi outcome		B	0,75	OK
Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah tercapai		B	0,75	OK
Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1,00	OK
Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang tercapai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		B	0,75	OK
Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0,33	OK
Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0,75	OK
Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		C	0,50	OK
PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)	4,50	60,00%	2,70	
Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00	OK
Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		C	0,50	OK
Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		C	0,50	OK
Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		C	0,50	OK
Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0,50	OK
EVALUASI INTERNAL (10%)	10,00	74,28%	7,43	
PEMENUHAN EVALUASI (2%)	2,00	93,75%	1,87	
Terdapat <i>pemantauan mengenai kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1,00	

Evaluasi program telah dilakukan		Y	1,00	
Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1,00	OK
Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0,75	OK
KUALITAS EVALUASI (5%)	5,00		73,67%	3,68
Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0,75	OK
Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
Penantuan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0,75	OK
Penantuan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0,67	OK
PERMANFAATAN EVALUASI (3%)	3,00		62,50%	1,88
Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		B	0,75	OK
Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0,50	OK
PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)	20,00		57,08%	11,42
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)	7,50		60,00%	4,50
Target dapat dicapai		B	2,00	
Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		C	0,50	
Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2,00	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)	12,50		55,33%	6,92 KKE capaian
Target dapat dicapai			0,75	
Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1,50	
Informasi capaian kinerja telah memadai			1,75	
Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			2,92	
KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA (100%)	100,00		76,97%	76,97



INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

JALAN RUHUI RAHAYU I

TELP / FAX : (0542) 7218734 KOTAK POS 1111 BALIKPAPAN 76115

EMAIL : inskot.balikpapan@yahoo.co.id